



Blaming the Victim:

Alienasi Gender dalam Media Online

Anna Puji Lestari

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Email: annapujilestari@gmail.com

Abstract

Rape victims in Central Java is very high, so that need to gain attention from various parties. Many rape news in Central Java have been reported by numerous mass media, Suaramerdeka.com is one of them. Suaramerdeka.com is the first online local media based on printed media in Indonesia. Based on that reality, this research was conducted. This research is qualitative with critical paradigm on Framing Entman design. This research results show that many sexual assault news on Suaramerdeka.com used Blaming the Victim point of view. The indication is Gender Alienation practice took place. Gender Alienation is important concept based on this research which explain that the opinion of rape victims and the victim defenders were alienated as news resources. Beside that, bias diction was chosen on rape news that strengthen Blaming the Victim news on online media. Gender Alienation Practice and bias diction is Cyber Symbolic Violence. Cyber Symbolic Violence pictured violence that took place because of language domination on online media.

Keywords: Gender Alienation, Cyber Symbolic Violence, Blaming the Victim, Online Media News.

Abstrak

Kasus pemerkosaan di Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Informasi kasus pemerkosaan di Jawa Tengah ditemukan di berbagai media massa, salah satunya adalah Suaramerdeka.com, Artikel ini menggambarkan pemberitaan kasus pemerkosaan dengan blaming the victim dengan menggunakan model analisis isi framing Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita kekerasan seksual di Suaramerdeka.com banyak menggunakan sudut pandang Blaming the Victim, dengan indikasi terjadinya Alienasi Gender. Alienasi Gender dalam pemberitaan online dibuktikan dengan penjelasan korban-korban kekerasan seksual ataupun pihak-pihak yang membela korban yang tidak diindahkan dalam pemberitaan. Selain itu,

dalam pemberitaan kasus pemerkosaan terdapat pemilihan diksi bias yang memunculkan *Blaming the Victim* pada pemberitaan media online. Hal ini merupakan wujud kekerasan simbolik siber. Kekerasan Simbolik Siber menggambarkan kekerasan yang terjadi karena dominasi bahasa berita media di dunia maya.

Kata Kunci: Alienasi Gender, Kekerasan Simbolik Siber, Blaming The Victim, Berita Media Online

1. Pendahuluan

Data dari Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan seksual, utamanya pemerkosaan, meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 kasus yang dilaporkan adalah 293.22 kasus. Tahun 2015 terdapat 16.217 kasus. Tahun 2016 terdapat 326.742 kasus sedangkan tahun 2017 terdapat 259.150 kasus. Meningkatnya kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah kenyataan bahwa terdapat banyak faktor yang melingkupi terjadinya hal tersebut dan perlu untuk dicari pemecahan masalahnya.

Di Jawa Tengah, kekerasan seksual yang terjadi didominasi oleh pemerkosaan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 2016, kekerasan terhadap perempuan jumlahnya mencapai 871 kasus yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota di Jateng dengan kasus pemerkosaan sebanyak 144 atau 29,3 persen. Pelakunya biasanya adalah orang terdekat yang kenal dengan korban.

Daerah dengan kasus pemerkosaan tertinggi adalah di Kota Semarang. Data LRC-KJHAM pada periode Januari sampai Februari 2017 mencatat sudah ada 58 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah dengan kasus pemerkosaan sebanyak 12 kasus atau 6,96 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih tergolong tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Pada kenyataannya, data tersebut tidak mewakili jumlah seluruh korban kekerasan seksual. Survei yang dilakukan Lentera Sintas Indonesia, Majalah Magdalene dan situs petisi online *Change.org* menyatakan bahwa 90 persen korban pemerkosaan di Indonesia bungkam karena rasa malu akan tekanan sosial. Rasa malu tersebut semakin diperkuat dengan pemberitaan kekerasan terhadap perempuan yang menyalahkan korban (*blaming the victim*) yang mengarah pada sadisme seksual. Penyebaran informasi pemerkosaan menjadi vulgar dengan dramatisasi situasi yang justru menyudutkan dan membuat malu korban. Banyak pemberitaan di media massa menggiring masyarakat untuk lebih menyalahkan korban pemerkosaan dan berempati pada pelaku yang berdalih tak mampu menahan gairah seksualnya karena ada perempuan berdiri sendirian di tengah malam menunggu kendaraan umum.

Tingginya kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah harusnya memang mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama media massa yang umumnya digunakan sebagai kaca mata oleh pembacanya untuk melihat "realita." Namun, pada kenyataannya, praktik jurnalisme sensitif gender masih belum banyak diterapkan oleh media massa. *Suaramerdeka.com* sebagai salah satu media online lokal di Jawa Tengah diharapkan mampu membuat berita sensitif gender sehingga

tidak memicu pembaca menyalahkan korban pemerkosaan dan menyadarkan seluruh masyarakat untuk menekan angka pemerkosaan. Namun, *Suaramerdeka.com* justru turut mengasilkan berita pemerkosaan dengan sudut pandang *blaming the victim*.

Misalnya saja pada berita yang tayang di *Suaramerdeka.com* tertanggal 1 Juni 2016, berjudul “Kasus Dugaan Pemerkosaan di Semarang Perlu Digali Lebih Dalam.” *Lead* dan potongan beritanya adalah sebagai berikut:

“SEMARANG, suaramerdeka.com – Perlu digali lagi apakah kasus dugaan pemerkosaan kepada anak di bawah umur yang dialami PL (12) di daerah Plamongan Kota Semarang, murni pemerkosaan atau ada unsur lainnya.”

“Anak masih labil, akan mencoba menggali lagi. Jika suka sama suka, seperti apa. Saya masih perlu waktu untuk bersama-sama psikolog menggali ada apa sebenarnya. Jika ada.”

Berita tersebut mengindikasikan mempersalahkan korban (*blaming the victim*) yang mencurigai korban tidak diperkosa. Menurut pandangan narasumber berita yang dipilih *Suaramerdeka.com*, ada kemungkinan mereka berhubungan intim karena suka sama suka (*sexual consent*). Konsep *blaming the victim* yang digunakan sebagai sudut pandang pemberitaan bisa dilihat sebagai kekerasan simbolik yang ditujukan pada korban kekerasan. Dari sudut pandang gender, hal ini tentu saja merupakan ketidakadilan.

Arti penting pemberitaan secara berimbang dan berkeadilan gender terdapat pada pasal 28-I (Ayat 1 dan 2) UUD 1945. Selain itu, ketidakadilan representasi perempuan di media bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan moral dan etika profesi wartawan pada Pasal 1. Selanjutnya, pada Pasal 2, terdapat kewajiban bahwa wartawan harus menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara. Selain itu, pada Pasal 4, disebutkan bahwa wartawan tidak diperkenankan cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Selain itu pada Pasal 8 juga menyatakan pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Di dalam Alquran disebutkan prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam Q.S. Al-Hujurat : 13 :

اتقاكم الله عند اكرمكم ان لتعارفوا وقيائل ثعوبا وجعلناكم واثى ذكر من خلقناكم انا الناس ابيها يا

“*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang bertaqwa diantara kamu.*”

Ayat tersebut merupakan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan yang dapat memarginalkan salah satu di antara keduanya. Keduanya mempunyai peran dan hak yang sama dalam menjalankan kehidupan. Yang membedakan hanya jenis kelamin saja, sementara keduanya mempunyai status dan peran yang sama.

Berdasarkan data kekerasan seksual di Jawa Tengah, khususnya Semarang, banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus pemerkosaan. Oleh

karena itu, *Suaramerdeka.com* sebagai koral lokal di Jawa Tengah dipilih dalam penelitian ini terkait konsep *blaming the victim* pada berita pemerkosaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan kekerasan simbolik berupa *blaming the victim* di *suaramerdeka.com*; (2) Mendeskripsikan *blaming the victim* berupa alienasi korban kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*.

Studi terdahulu mengenai *blaming the victim* pernah dilakukan oleh Laura Niemi dan Lianne Young (2014) berjudul "*Blaming the Victim in the Case of Rape*" yang menemukan model pemerkosaan dengan memetakan terjadinya serangan seksual dan pemerkosaan. Model tersebut menggambarkan bahwa sebab pemerkosaan yang dilakukan pelaku dan adanya kultur yang melihat bahwa korban patut disalahkan mewujudkan seorang korban pemerkosaan disalahkan. Penelitian tersebut dalam ranah kajian psikologi. (Niemi: 2014: 23)

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian komunikasi yang fokus pada bahasa bias gender yang menunjukkan cara mengenali *blaming the victim* di media. Pada akhirnya penelitian ini akan memunculkan model untuk menganalisis berita *blaming the victim* di media massa, khususnya media online. Konsep *Blaming the victim* yang digunakan dalam penelitian ini mendeskripsikan bahwa korban pemerkosaan disalahkan dan dituduh sebagai penyebab peristiwa traumatis yang menimpanya. Korban disalahkan karena dianggap pasif (pasrah dan menerima serta menikmati perlakuan seksual dari pemerkosa). Sedangkan penjahat dianggap tidak bersalah karena tidak mungkin bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu, dalam pandangan masyarakat patriarki merupakan sesuatu yang dianggap tidak bisa dikontrol oleh manusia.

Penelitian ini fokus mengenai berita-berita *Suaramerdeka.com* yang mengandung unsur *Blaming the Victim*. Dilakukan analisis pada 5 berita kekerasan seksual yang memiliki derajat *Blaming the Victim* yang dinilai paling tinggi menurut penulis selama periode Januari 2016 - Desember 2017. Tahapan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan bahan berupa teks-teks berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* untuk kemudian dianalisis dengan metode Framing Entman. Analisis framing Entman dimaksudkan untuk menunjukkan adanya praktik penulisan berita *blaming the victim*.

2. Hasil Penelitian

Konsep *Blaming the Victim* pertama kali dikemukakan oleh Ryan William (1971). Ryan mengkritisi iklan poster sebuah perusahaan farmasi besar pada saat itu. Iklan tersebut memberikan label akan kelalaian para ibu dalam menjaga balitanya karena dianggap tidak memberikan pengawasan terus-menerus. Para ibu dinilai bersalah karena tidak bisa mencegah balitanya memakan serpihan krayon. (Ryan: 1971: 32)

Ryan menjelaskan, iklan tersebut membebankan kesalahan pada para ibu atas kematian atau sakit parah yang menimpa anak-anak mereka akibat memakan krayon. Hal tersebut, menurut Ryan, merupakan distorsi realitas yang mengerikan. Menyalahkan para ibu atas kematian anaknya merupakan kedok bagi perusahaan farmasi seolah memiliki jiwa kemanusiaan dan berpihak pada publik. Selanjutnya, oleh Ryan, fenomena tersebut diterjemahkan sebagai *blaming the victim*. (Ryan: 1971-35)

Ryan juga menjelaskan konsep *blaming the victim* dalam penerapannya pada masyarakat miskin di Amerika pada saat itu. Masyarakat miskin disalahkan karena

dinilai miskin motivasi untuk bekerja dan kekurangan informasi kesehatan. Ryan menyatakan bahwa setiap peristiwa kejahatan, sakit mental, penyimpangan masyarakat, pengangguran, selalu dibangun berdasarkan kerangka ideologi *blaming the victim*. Ryan William mendeskripsikan *blaming the victim* sebagai sebuah cara untuk mempertahankan kepentingan kelompok berkuasa.

Konsep *blaming the victim* kemudian diadopsi oleh para advokat untuk korban kriminal, khususnya kasus pemerkosaan. Konsep *blaming the victim* pada korban kejahatan seksual adalah menyatakan bahwa korban pemerkosaan dianggap sebagai pendosa (Schoellkopf, 2012: 34). *Blaming the victim* menunjukkan tendensi bahwa para korban serangan seksual bertanggung jawab atas serangan yang menimpanya. Lebih lanjut, korban pemerkosaan yang diserang oleh orang yang dikenal cenderung disalahkan daripada perempuan yang diperkosa oleh orang yang tidak dikenal (Amir, 1971: 65).

Terdapat sejumlah alasan mengapa orang-orang menyalahkan korban atas tindak kriminal yang dialaminya. Menurut *The Canadian Resource Centre for Victims of Crime* (2009), alasan tersebut adalah berawal dari miskonsepsi mengenai peran korban dan pelaku aksi kekerasan. Korban seringkali secara salah digambarkan sebagai individu pasif dan menerima kekerasan yang dialaminya. Sedangkan pelaku pemerkosaan dianggap sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan karena diarahkan oleh kekuatan yang tidak dapat dikontrol olehnya, misalnya saja, nafsu birahi.

Ryan menyatakan bahwa sebab korban disalahkan karena erat kaitannya dengan mitos (Ryan: 1971: 35). Mitos adalah suatu keyakinan yang beredar luas menyangkut suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Menurut Roland Barthes, mitos berkaitan erat dengan sejarah dan bentukan masyarakat pada masanya, tetapi Barthes memandangnya sebagai bentuk pesan atau tuturan (menyesatkan) yang terus diyakini kebenarannya walau tidak dapat dibuktikan. Barthes (1972: 3-5) menyebutkan, tuturan mitologis bukan saja berbentuk tuturan oral melainkan dapat pula berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, pertunjukan, bahkan iklan dan lukisan.

Mitos-mitos tentang pemerkosaan mempunyai sejarah yang panjang dan berasal dari hukum-hukum yang berlaku di masa lalu. Pada masa lalu, pemerkosaan adalah sebuah ritual yang dilakukan laki-laki untuk memperoleh istri, apabila laki-laki memerkosa seorang perempuan, maka ia akan mendapatkan hak untuk mengambil perempuan tersebut (Damayanti, 1999: 23).

Mitos yang hidup dan berkembang selama ribuan tahun menyatakan bahwa perempuan pada dasarnya adalah penggoda sebagaimana Hawa menggoda Adam. Mitos ini terus menerus diyakini masyarakat sehingga laki-laki kemudian tidak disalahkan atas tindak pemerkosaan yang dilakukannya. Mitos yang menyatakan bahwa perempuan menggoda gairah laki-laki untuk memerkosanya, telah terbantahkan oleh berbagai riset. Faktanya, ditemukan bahwa mayoritas pemerkosaan direncanakan. Dengan demikian, pemerkosaan merupakan tanggung jawab pemerkosa, bukan korban. Pemerkosalah yang seharusnya disalahkan atas tindak kejahatan yang dilakukannya.

Entman menyatakan, (1993: 52), membingkai atau *framing* berarti memilih (seleksi) beberapa aspek realitas dan membuatnya lebih menonjol (*salient*) dalam mengomunikasikan teks. Hal-hal tersebut kemudian mengarahkan kepada, *defined problems* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), *suggest*

remedies (menekankan penyelesaian) yang pengungkapan *treatment* yang diberikan media terhadap korban.

Teks yang diteliti adalah berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* yang diterbitkan di *Suaramerdeka.com* antara Januari 2016 hingga Desember 2017 (dua tahun). Jumlah berita tentang kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* pada periode tersebut sebanyak 64 berita. Dari total jumlah berita tersebut, dipilih 5 (lima) berita untuk dianalisis secara mendalam dengan Framing Entman. Lima berita yang dipilih dengan pertimbangan memiliki derajat *blaming the victim* tertinggi menurut penulis. *Blaming the victim* tinggi adalah menilai aktor korban menikmati hubungan seks dengan pemerkosa (*sexual consent*). Berikut ini tabel analisa teks menggunakan framing Entman yang telah peneliti susun untuk melihat kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim*;

Framing	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4	Berita 5
Define problem (penentuan masalah)	Masalah pemerkosaan (P1,K1; P3,K6; dan P5,K12).	Masalah pemerkosaan (P1,K2; P2,K4;P4,K11; P5,K13; dan P5,K12).	Masalah pemerkosaan: pemelintiran makna <i>sexual consent</i> (P1,K1;P1,K; P2,K3;P6,K8; dan P6, K9)	Masalah pemerkosaan (P4, K9).	Masalah pemerkosaan (P1, K1; P6, K12; dan P2, K4).

<p>Diagnose Causes (sebab pemerkosaan)</p>	<p>Aktor korban dinilai bertanggung jawab atas serangan seksual yang menimpanya. Peralnya, aktor korban masih lugu (P5, K10); Dengan rayuan aktor pelaku (P5, K12; P7, K15); Dua aktor pelaku dan satu aktor korban tidak sadar (P6, K14); tidak ada paksaan dari aktor pelaku (P7, K16).</p>	<p>Perempuan cantik sebagai obyek seks yang mengundang predator seksual. Aktor pelaku tertarik dengan kecantikan korban (P2, K6); aktor korban masuk perangkap (P4, K10).</p>	<p>Aktor korban dituding menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Dengan menyatakan aktor korban tidak kesakitan (P6, K9). Hubungan atas dasar suka sama suka, bujuk rayu aktor pelaku terhadap aktor korban (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8).</p>	<p>Aktor korban dituding menikmati hubungan seks dengan aktor pelaku. Diduga karena suka sama suka (<i>sexual consent</i>) (P3, K4).</p>	<p>Sebab pemerkosaan adalah aktor korban yang berhasil diperdayai oleh aktor-aktor pelaku dengan dicekoki minuman keras (P2, K3).</p>
<p>Make Moral Judgement (evaluasi peran aktor atau narasumber dalam berita)</p>	<p>-Aktor polisi: Menyatakan peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa asusila (P3; K6). -Aktor Pelaku 1: Menyatakan merayu aktor korban (P5,</p>	<p>-Aktor polisi: Menyatakan bahwa aktor korban masuk perangkap aktor pelaku (P4, K10). -Aktor pelaku: Menyatakan bahwa</p>	<p>Aktor polisi: berulang kali menyatakan bahwa aktor korban tidak diperkosa, hubungan didasari rasa suka sama suka karena bujuk rayu (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9).</p>	<p>Aktor Wakil Wali Kota Semarang: menyatakan bahwa ada kemungkinan hubungan seksual karena suka sama suka (P3, K4); (P3, K6).</p>	<p>Aktor polisi: menyatakan bahwa telah melakukan penanganan (P4, K8); Berhasil menangkap lima dari delapan tersangka (P5, K9).</p>

	K12; P7,K15) dan tidak ada paksaan (P7, K16). -Aktor Pelaku 2: Menyatakan tidak memerkosa, melainkan menyentuh tubuh aktor korban (P8, K19).	melakukan pemerkosaan karena tertarik dengan kecantikan aktor korban (P2, K6).			
Suggest Remedies (justifikasi media terhadap masalah pemerkosaan)	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P5, K10; P5, K12; P7,K15; P6, K14; P7, K16).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P2, K6); (P4, K10).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P1, K1); (P1, K2); (P2, K3); (P6, K8); (P6, K9).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P3, K4); (P3, K6).	<i>Suaramerdeka.com</i> melakukan <i>blaming the victim</i> (P2, K3).

Keterangan : P = Paragraf; K = Kalimat.

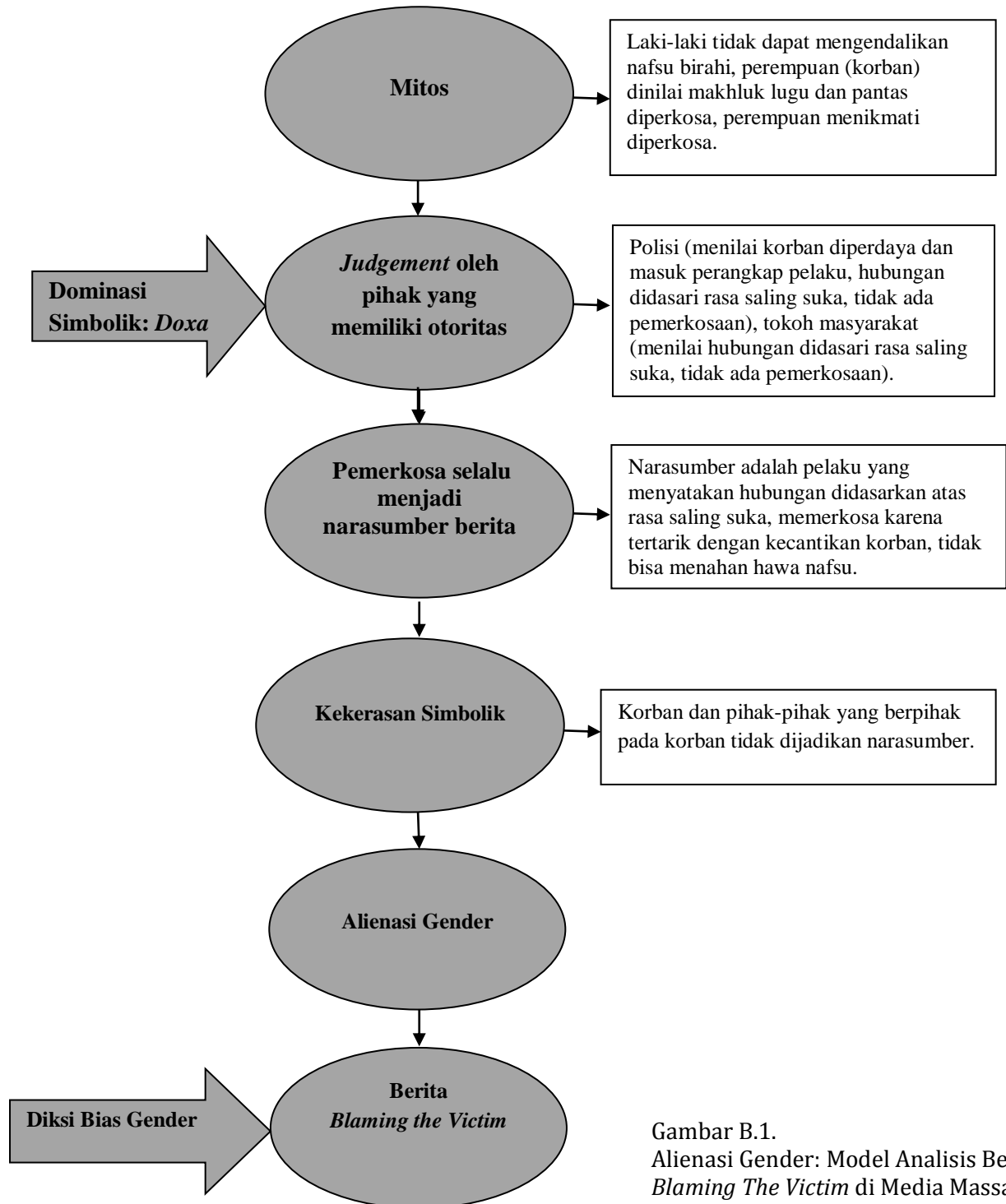
Tabel B.1
Hasil Analisis Teks dengan Framing Entman

Dalam menentukan berita yang tertulis di *Suaramerdeka.com* sebagai pemerkosaan (*define problem*), peneliti berpedoman pada definisi pemerkosaan oleh beberapa tokoh yang kompeten mengenai masalah seksualitas perempuan serta nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat mengenai pemerkosaan. Sebagaimana dinyatakan Entman bahwa *define problem* biasanya diukur berdasarkan nilai-nilai dalam budaya bersama (Entman: 1991: 52).

Berita-berita yang dianalisis pada tabel tersebut merupakan berita pemerkosaan dengan sudut pandang *Blaming the Victim*. Pemerkosaan artinya pemaksaan seksual tanpa persetujuan aktor korban untuk berhubungan seks. Sebagaimana dinyatakan Carol Hensell bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*), termasuk dalam hubungan pernikahan (Carol Hensell, 2011: 115).

Lebih lanjut, Hensell menjelaskan, *consent* adalah kedua belah pihak harus bersepakat jika mereka ingin berhubungan seks. Kedua belah pihak harus sepenuhnya sadar dan waspada. Kedua pasangan sama-sama bebas untuk bertindak

dan mengomunikasikan dengan jelas keinginan mereka dan meminta izin. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka terjadi kekerasan seksual. Telaah hasil penelitian apabila digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar B.1.
Alienasi Gender: Model Analisis Berita *Blaming The Victim* di Media Massa Online

Dari gambar di atas terlihat bahwa korban ataupun pihak yang berpihak terhadap korban tidak dijadikan narasumber berita atau tidak diberi ruang untuk membela korban di media. Pihak-pihak yang kerap dihadirkan sebagai narasumber justru pelaku dan pihak yang dianggap memiliki otoritas, yakni tokoh masyarakat dan polisi. Pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas ini menjalankan mekanisme dominasi simbolik. Mekanisme dominasi simbolik nantinya memuncak pada pemikiran Bourdieu tentang *doxa*. *Doxa* merupakan pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa (Bourdieu, 1991). Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat mudah dicerna oleh rakyat banyak, walaupun secara konseptual pandangan tersebut mengandung banyak kesesatan. Dalam hal ini, misalnya adalah pandangan penguasa (ideologi dominan) bahwa korban turut menikmati berhubungan seks dengan pelaku.

Berita *Blaming the Victim* merupakan berita yang diawali dengan mitos yang banyak berkembang di masyarakat bahwa perempuan patut diperkosa dan menikmati diperkosa. Selanjutnya, mitos dalam berita dikukuhkan dengan *moral judgement* dari tokoh masyarakat ataupun polisi yang menilai bahwa tidak terjadi pemerkosaan melainkan hubungan seksual yang didasari perasaan saling suka, korban (perempuan) makhluk lemah dan mudah diperdayai, korban merupakan perempuan cantik dan mengundang birahi pemerkosa. kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik terjadi karena dominasi bahasa berita yang menyatakan bahwa korban pemerkosaan digilir setelah berhasil diperdayai oleh aktor pelaku.

Lebih lanjut, narasumber yang dihadirkan justru pelaku yang membela diri dengan mengatakan tidak memerkosa melainkan hubungan saling suka atau menyatakan bahwa dia tidak bisa mengendalikan nafsu birahi sehingga tidak dapat disalahkan sepenuhnya apabila memerkosa sedangkan korban dinilai cantik dan seksi sehingga mengundang nafsu birahnya.

Semua pernyataan narasumber berita yang menyalahkan korban dan membela pelaku merupakan kekerasan simbolik. Secara spesifik, kekerasan simbolik ini meniadakan pendapat korban atau pihak-pihak yang membela korban. Penyingkiran pendapat yang membela korban ini dimanakan alienasi gender. Alienasi gender merupakan indikator terjadinya *blaming the victim*: korban pemerkosaan patut disalahkan.

Alienasi gender bisa dikatakan sebagai indikator terjadinya berita *blaming the victim*. Alienasi gender terjadi manakala tidak hadirnya korban sebagai narasumber yang membela dirinya atas peristiwa traumatis yang dialami. Tidak hadirnya aktor korban sebagai narasumber berita membentuk opini publik secara salah. Adapun istilah alienasi merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Hegel. Hegel menyerap konsep alienasi dari teologi Protestan yang biasanya digunakan berkaitan dengan alienasi seseorang dari Tuhan (Feuer, 1962: 117).

Alienasi (*alienation*) berasal dari kata berbahasa Latin *alienatio*. Kata benda ini menderivasi maknanya dari kata kerja *alienare* (untuk menjadikan sesuatu milik orang lain, membawa pergi melepaskan). Salah satu penggunaan pokok dalam bahasa Latin terhadap *alienare* berhubungan dengan kepemilikan. Dalam konteks ini, *alienare* berarti 'mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain' (Kaufman, 1965: 143).

Selanjutnya, Karl Marx menggunakan konsep alienasi untuk berbicara mengenai eksistensi hubungan alienasi antara pekerja dan produknya oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing dan bermusuhan. Marx memikirkan antara lain

dominasi terhadap produk yang merupakan dominasi terhadap pekerja itu sendiri karena pekerja tidak bisa menikmati produk tersebut. Bagi Marx, seharusnya, karakteristik esensial manusia adalah individualitas, sosialitas dan inderawi, bukannya dominasi (Marx, 1963: 122).

Konsep alienasi yang dikemukakan oleh Marx telah memunculkan penggunaan istilah tersebut oleh sejumlah besar tokoh-tokoh dalam kaitannya dengan ketidakmampuan untuk mengontrol atau bahkan memahami berbagai peristiwa dan struktur sosial, ekonomi, dan yang paling utama politik yang memengaruhinya (Richard Schaacht, 2009: 222).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa berita-berita pemerkosaan di atas tidak akurat. Berita tidak akurat adalah mendistorsi arti penting fakta tertentu dengan menunjukkan suatu realitas yang sesungguhnya hanya detail tidak penting dan kurang penting atau “meremehkan” fakta penting (Rolnicki, Tate, Taylor, 2008: 4-5). Tidak disertakannya korban ataupun pakar pemerhati gender sebagai narasumber merupakan indikator bahwa berita yang ditulis tidak menggali data mendalam. Tidak mendalamnya data yang dihadirkan dalam berita merupakan wujud jurnalisme yang tidak profesional karena berhenti mencari kebenaran sebelum terungkap sepenuhnya (Schudson dan Anderson, 2009: 91-92). Menurut Lippmann seharusnya berita mengumpulkan bukti mendalam dan menyediakan informasi sebanyaknya bagi pembaca (dalam Schudson dan Anderson, 2009: 92).

Apabila korban tidak mau diwawancarai karena malu, pada prinsipnya untuk mencapai keberimbangan berita (*cover both side*), dicari narasumber lain semisal keluarga korban atau KPAI atau Komnas Perempuan sebagai pihak yang mengerti betul bagaimana membela korban kekerasan seksual sehingga tidak terjadi berita *Blaming the Victim*. Selain itu, pemilihan diksi bias gender juga menyumbang terjadinya *blaming the victim*. Pada berita yang dianalisis di atas, diketahui wartawan menggunakan kata “digilir” pada korban pemerkosaan. Kata digilir memiliki konotasi bahwa korban kekerasan seksual merupakan obyek seks yang bisa digilir oleh para pelaku pemerkosaan. Dengan demikian, penggunaan kata “digilir” memperteguh gambaran perempuan di media massa sebagai obyek seks. Sebagai obyek seks, perempuan korban pemerkosaan akan cenderung disalahkan.

Gambaran perempuan dalam lima teks berita yang dianalisis di atas, membuktikan bahwa terdapat praktik *blaming the victim* pada berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*. Praktik *blaming the victim* ternyata tidak bisa lepas karena berlangsungnya alienasi gender dan pemilihan diksi yang bermakna korban merupakan obyek seks. *Blaming the victim* yang terjadi karena praktik Alienasi Gender dan pemilihan diksi bias merupakan kekerasan simbolik (*Symbolic Violence*). *Symbolic Violence* sendiri bisa terjadi karena adanya kekuatan simbolik (*symbolic power*). Bourdieu menjelaskan bahwa *power* ada di mana-mana. Namun, ironisnya, kita semua tidak bisa mengenalinya. Bourdieu menjelaskan, kita semua dituntut untuk mengenali *power* yang tidak terlihat yang ia sebut *symbolic power*. *Symbolic power* merupakan *power* yang tidak terlihat, bahkan oleh subjek *power* tersebut (Bourdieu: 1991: 163-4).

Perempuan korban kekerasan seksual di media massa mengalami kekerasan simbolik karena disalahkan atas tragedi pemerkosaan yang menimpanya. Lewat bahasa yang mengintimidasi dan tidak sensitif gender, perempuan dituding sebagai pihak yang memprovokasi terjadinya pemerkosaan yang menimpaya melalui kekuasaan simbolik bahasa. Bahasa menjadi bagian dari sistem simbolik selain seni, agama, dan mitos. Bahasa menjadi instrumen mempertahankan dominasi atau

instrumen untuk mendapatkan kekuasaan (*power*). Bahasa adalah kekuasaan simbolik. Pertukaran bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991: 37).

Banyak orang tidak sadar akan adanya intimidasi, kekerasan simbolik lewat dominasi bahasa. Ucapan tidak hanya disampaikan untuk dipahami tetapi juga sebagai tanda otoritas yang harus diyakini dan dipatuhi (Bourdieu, 1991: 66). Selanjutnya, mereka yang menguasai kapital yang lebih besar (laki-laki) akan menjadi kelas yang dominan. Menurut hemat peneliti, Bourdieu melihat sistem simbolik (melalui bahasa) sebagai instrumen dominasi. Tradisi fungsionalisme ini menjelaskan produksi simbol dengan mengaitkannya dengan kepentingan kelas dominan. Kepentingan kelas dominan mewakili ideologi kelompok tertentu yang di-*share* ke masyarakat luas.

Kultur dominan membentuk integrasi di antara kelompok atau kelas dominan. Budaya dominan juga berperan dalam membentuk integrasi masyarakat yang semu, kesadaran palsu, legitimasi kepada aturan yang sudah mapan, menciptakan perbedaan hierarkhis dan melegitimasi perbedaan ini. Kekerasan simbolik dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik itu melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan memaksakan legitimasi pada tatanan sosial.

Lebih lanjut, praktik Alienasi Gender pada media massa online melanggar Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dibuat oleh Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat. Yakni melanggar peraturan nomor 2 tentang verifikasi dan keberimbangan berita butir b, sebagai berikut: "Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan."

Berita-berita yang mengandung praktik Alienasi Gender juga melanggar butir d karena tidak menuliskan berita susulan untuk menunjang verifikasi berita sebelumnya. Bunyi butir d adalah, "Media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi." Artinya, *Suaramerdeka.com* memutus berita yang belum tuntas dengan tidak menulis berita lanjutannya untuk verifikasi dan keberimbangan berita.

3. Analisa

Penulisan berita dilakukan oleh aktor untuk suatu tujuan (Entman, 1991: 52). Aktor yang dimaksud adalah aktor dalam *newsroom* yang memiliki pengaruh pada penulisan dan penayangan berita. Dalam menuliskan berita, aktor-aktor tersebut pastilah menuliskan dan menayangkan berita dari sudut pandang tertentu, untuk tujuan tertentu. Hal tersebut terjadi karena dalam kerja teknis jurnalistik melibatkan aktor-aktor yang kemudian menentukan definisi suatu peristiwa. Aktor-aktor tersebut mendefinisikan fakta yang dipandang memiliki kandungan nilai berita, yaitu penting dan menarik bagi khalayak (Siregar, 2008: 241). Dengan demikian, tujuan "menarik perhatian khalayak" inilah yang semata dijadikan kunci bagaimana aktor-aktor wartawan menuliskan berita. Berita "menarik" tersebut abai dalam akurasi dan keberimbangan.

Penulisan berita "menarik" yang bertujuan menarik pembaca untuk keuntungan bisa juga dikategorikan sebagai banalitas jurnalistik. Dalam sebuah proses komunikasi, banalitas bisa juga dimaknai sebagai proses pendangkalan makna terhadap substansi pesan komunikasi sebagai akibat adanya rekayasa informasi dan teknologi media yang disebabkan tumpang tindihnya berbagai

kepentingan dari pihak pembuat pesan, baik yang berupa kepentingan estetika, kepentingan politik, maupun kepentingan ekonomi (Siti Solikhati dkk, 2015: 103-4).

Berita ditulis dengan pendefinisian fakta. Pendefinisian fakta ke dalam berita dipengaruhi faktor-faktor internal dari aktor wartawan dan aktor-aktor yang terlibat dalam *newsroom*. Faktor-faktor internal aktor menurut Bourdieu bisa diartikan sebagai menalarkan berbagai peristiwa yang berakar dalam pengalaman sensoris, dari cara pandang seseorang yang disimbolkan (dalam Jenkins, 2016: 107-8). Artinya, berita *Blaming the Victim* merupakan simbolisasi perempuan sebagai korban yang erat kaitannya dengan cara pandang aktor-aktor yang terlibat pada penulisan berita.

Berkaitan dengan hal tersebut, John C. Merrill menyatakan bahwa seorang jurnalis melakukan proses mengenai cerita apa yang akan dihadirkan, memilih mana yang akan digunakan dan mengekspresikannya ke dalam tulisan dipengaruhi oleh karakter moral pekerja media (dalam Gordon, Kittross, Reuss, 1996: 1-2). Karakter moral ini kemudian berpengaruh pada hasil penulisan berita. Dalam banyak kasus pemberitaan media, terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan, umumnya disertai penggambaran buruk pihak yang kurang dominan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada berita kekerasan seksual, posisi korban (*victim*) disalahkan (*blaming*). Pasalnya, korban merupakan pihak kurang dominan yang cenderung digambarkan serba buruk oleh media. Berita *blaming the victim* sesungguhnya menyalahi demokrasi komunikasi. Demokrasi memang mengandaikan kebebasan untuk berfikir, berbicara dan berkomunikasi tanpa diskriminasi, manipulasi dan represi (Hardiman, 2010: 185). Karenanya, sebagai pembaca kita dituntut bersikap kritis terhadap praktik bias gender media.

Pembaca kritis harus memahami bahwa sebuah berita di media bukan hanya rangkaian fakta yang tersusun menjadi sebuah kalimat dan paragraf. Berita merupakan perwujudan pemikiran dan sikap wartawan, editor, Redaktur Pelaksana, Pemimpin Redaksi, pemilik media, atau bahkan juga *stake holder*. Media massa merupakan kombinasi aksi dan pengambilan keputusan banyak pihak. Hasil tersebut kebanyakan berasal dan dilakukan dari sedikit individu. Dengan demikian, inti dari semuanya, adalah nilai individu. Keputusan bersama dibuat oleh para aktor yang bekerja untuk media berita, semuanya berasal dari nilai individu.

Individu-individu dalam struktur *newsroom* media, sebagaimana hasil penelitian ini masih dipengaruhi paham dominan (patriarki) dalam mendeskripsikan berita kekerasan seksual terhadap perempuan. Dari sudut pandang ekonomi politik, kuasa media bisa dinilai telah mencederai kepercayaan pembaca. Kepercayaan pembaca dicerai karena media belum bisa menghadirkan informasi yang benar dan mendidik.

Dengan demikian, berdasarkan pemahaman ekonomi politik, media membuat semacam hegemoni dengan membatasi agenda tertentu mengenai proses politik dan seluruh bidang kultural yang memungkinkan representasi yang dilakukan (Gaye Tuchman dalam Jensen, 2002: 81). Semua pemberitaan dalam media, melibatkan simbol-simbol dominan dalam masyarakat, dibentuk ulang dan dipertegas melalui proses pemberitaan (Gaye Tuchman dalam Jensen, 2002: 81).

Pembentukan ulang simbol-simbol dominan dalam masyarakat oleh jurnalisme online terasa sangat cepat penyebarannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan proses pemberitaan jurnalisme online berbeda dengan jurnalisme cetak. Proses pemberitaan berbeda karena karakteristik media online berbeda dari

media cetak. Beberapa karakteristik media/jurnalisme *online*, antara lain: *Unlimited space* dan *Storage and Retrieval*. Jurnalistik *online* memungkinkan berita “abadi”, tersimpan, dan bisa diakses kembali dengan mudah kapan dan di mana saja.

Berdasarkan dua poin di atas, seharusnya berita online memiliki ketegasan verifikasi data dan pembahasan mendalam baik dalam bentuk satu kali penayangan berita utuh atau dalam bentuk *follow up stories*. Pentingnya verifikasi dalam berita online karena sifat halaman tak terbatas dan abadi. Namun, ironisnya fakta di lapangan menyatakan sebaliknya.

Louis Althusser (dalam Al-Zastrouw, 2000: v-xii) menulis bahwa media, dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa, sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok berkuasa (*ideological state apparatus*).

Berbagai kepentingan yang sedang “bermain” ada dalam kerangka kultur di mana media tersebut berada. Sebagaimana pernyataan Siregar, informasi didominasi oleh latar kultural dimana media itu berada (Siregar, 2014: xxii). *Suaramerdeka.com* berada di Jawa Tengah yang masih memegang kuat budaya patriarki hingga sekarang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa bias berita terjadi karena media massa berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Derajat bias media ini, setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal: kapasitas dan kualitas pengelola media, kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial, serta taraf kekritisasi dari masyarakat (Sobur, 2012: 35).

Bias berita bukanlah persoalan kecil. Bahasa tidak netral dan tidak pula sepenuhnya dalam kontrol kesadaran. Karena itu, bias yang berasal dari bahasa adalah bias yang sesungguhnya amat berbahaya, ibarat musuh yang menikam dari belakang (Sobur, 2012: 35). Dalam kaitannya dengan konvergensi media, *Suaramerdeka.com* mengikuti arus menggabungkan berbagai platform komunikasi menuju dinamika pasar. Selain memiliki media cetak, *Suara Merdeka* membarenginya dengan bentuk barita *online*, *e-paper* dan *live streaming*. *Suara Merdeka* sebagai sebuah industri dituntut mampu menyesuaikan perkembangan. Celakanya, yang diutamakan adalah perkembangan pasar (ekonomi pasar), bukan perkembangan membangun masyarakat kecerdasan masyarakat, terutama kecerdasan gender.

Ekonomi pasar menurut Arendt cenderung mengikis habis solidaritas warga. Arendt mengkritik kapitalisme dari perspektif demokrasi, dan kritik seperti itu juga dilakukan Jurgen Habermas melalui konsep ruang publik. Habermas menjelaskan, sistem kapitalis merupakan ancaman nyata bagi formasi ruang publik otonom. (dalam Hardiman, 2016: 186). Kapitalis menjadikan masyarakat menjadi tidak berdaya. Keberdayaan dikembalikan kepada siapapun yang menguasai pasar. Modal yang dimilikinya dapat menggerakkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya.

Media massa cetak pada umumnya dan media massa online pada khususnya, dewasa ini tidak menggambarkan *public sphere* karena opini publik akan terperangkap di dalam pertukaran komunikasi yang berciri massa (W. Kornhauser dalam Habermas, 2015: 343). Beberapa alasan yang mendasarinya adalah, *pertama*, proporsi masyarakat yang mengungkapkan opini jauh lebih sedikit ketimbang yang menerimanya. Komunitas publik dilihat tak lebih sebagai kumpulan abstrak individu

yang menerima semua pemahaman mereka dari media massa. *Kedua*, komunikasi massa adalah komunikasi yang begitu tertata, sampai-sampai sulit atau mustahil bagi individu untuk menanggapi dengan cepat dan efektif. *Ketiga*, realisasi opini dalam tindakan dikontrol oleh otoritas yang mengorganisasi dan mengontrol saluran-saluran tindakan tersebut. *Kelima*, media massa tidak pernah otonom dari institusi-institusi yang ada. Sebaliknya, yang terjadi adalah agen-agen institusi otoritatif malah menginfiltrasi massa, mereduksi otonomi apa pun yang dimiliki media massa dalam membentuk opini lewat diskusi (Miller dalam Habermas, 2015: 344).

Sebenarnya, media bisa saja menjalankan fungsinya sebagai *agent of change* bagi terwujudnya *gender equality*. Media dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris. Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media berada pada posisi mendua. Artinya, ia dapat memberikan pengaruh-pengaruh “positif” maupun “negatif”. Tentu saja, atribut-atribut normatif ini bersifat sangat relatif tergantung pada dimensi kepentingan yang diwakili.

Memang persoalannya adalah bahwa media tidak bisa bersifat netral. Misalnya atribut-atribut tertentu dari media dapat mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Sebagaimana dikatakan oleh Marshal McLuhan, “*the medium is the message*”, medium itu sendiri merupakan pesan. “apa-apa yang dikatakan” ditentukan secara mendalam oleh medianya.

Sebagai uraian analisa penulis, dapat dikatakan sejauh ini, praktik jurnalisme di perusahaan media online lokal berbasis media massa cetak pertama di Indonesia, *Suaramerdeka.com*, masih menggampangkan keberimbangan berita online. Selama ini, berita-berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* hanya memuat satu sudut pandang narasumber yang berkeyakinan bahwa korban pemerkosaan bertanggung jawab atas peristiwa traumatis yang menimpanya (*blaming the victim*). Artinya, kultur dominasi patriarki kental hadir dalam *newsroom Suaramerdeka.com*.

Disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung, yang tersebar dan selalu lestari melalui media massa adalah ideologi gender dominan. Melalui media massa, masyarakat dapat belajar menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat agar berperilaku seturut perbedaan dan stereotip gender. Seharusnya, melalui media, selain lingkungan keluarga, sekolah, dan teman-teman dekat, media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang sangat menentukan karena mampu secara khusus berpengaruh dalam menyalurkan keinsyafan dan penghargaan gender.

Alienasi Gender mencoba menjawab pandangan ideologi dominan yang meniadakan pendapat korban pemerkosaan sebagai narasumber berita. Ideologi dominan dalam berita pemerkosaan selalu menghadirkan narasumber yang tidak berpihak pada korban. Seringkali para narasumber yang dihadirkan justru menyatakan bahwa korban pemerkosaan bertanggung jawab terhadap serangan seksual yang menimpanya (*blaming the victim*).

Konsep Alienasi Gender menjelaskan realita bahwa korban pemerkosaan teralienasi (terasing, hanya dijadikan obyek) karena ia tidak bisa menjadi subjek dan menjelaskan peristiwa traumatis yang menimpanya dari sudut pandangnya (Anna Puji Lestari, 2019a). Gambaran perempuan dalam lima teks berita yang telah dianalisis membuktikan bahwa terdapat praktik *blaming the victim* pada berita

kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com*. Praktik *blaming the victim* ternyata tidak bisa lepas karena berlangsungnya Alienasi Gender dan pemilihan diksi yang bermakna korban pantas dijadikan obyek seks.

Perwujudan diksi bias dan praktik Alienasi Gender yang mengindikasikan terjadinya berita *Blaming the Victim* sesungguhnya merupakan kekerasan simbolik siber (*Cyber Symbolic Violence*). Istilah tersebut penulis kemukakan untuk menjelaskan banyaknya fenomena kekerasan simbolik yang dialami perempuan di dunia maya, baik di kanal *Youtube, Instagram, Facebook, Twitter*, maupun media daring lainnya (Anna Puji Lestari, 2019b). Kekerasan Simbolik Siber banyak dialami perempuan dikarenakan sejak kecil perlakuan antara laki-laki dan perempuan dibedakan, dalam akses pendidikan dan sosial kemasyarakatan perempuan cenderung dinomorduakan (Anna Puji Lestari 2018: 3).

Dengan demikian, *cyber symbolic violence* penting untuk diwaspadai mengingat dampaknya dua kali lipat (*two folds*) dibanding kekerasan simbolik di dunia nyata atau di media arus utama yang tidak melibatkan internet. Pasalnya, dalam informasi yang melibatkan internet, ketika suatu konten sudah diunggah, tidak akan hilang walau sudah dihapus dan memiliki sebaran yang luas hingga bisa diakses ke penjuru negeri.

4. Kesimpulan dan Penutup

Terdapat temuan penting dari penelitian ini untuk menganalisa terjadinya *Blaming the Victim* berita media, yakni dimunculkannya konsep Alienasi Gender. Setelah dilakukan analisis terhadap lima teks berita asusila di *Suaramerdeka.com*, diketahui bahwa berita *blaming the victim* terjadi karena korban kekerasan seksual tidak dihadirkan sebagai narasumber berita (Alienasi Gender). Jikalau korban tidak mau diwawancarai, pada prinsipnya, untuk mencapai keberimbangan berita (*cover both side*), seharusnya dicari narasumber lain semisal keluarga korban atau KPAI atau Komnas Perempuan sebagai pihak yang mengerti betul cara membela korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Buku

- Amir, M. (1971). *Patterns in Forcible Rape*. Chicago: University of Chicago Press.
- Al-Zastrouw Ng. (2000). "Membaca Berita yang Tidak Diberitakan." Dalam Winarko, H. *Mendeteksi Bias Berita: Panduan Untuk Pemula*. Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKRI) untuk Garda Bangsa.
- Barthes, Roland. (1972). *Mythologies*. Selected and translated from the French by Annette Lavers. New York: THE NOONDAY PRESS.
- Bourdieu, Pierre. (1991). *Language and Symbolic Power*. Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson, Cambridge UK: Polity Press.
- Damayanti, Yeni Rosa. (1999). "Ketika Korban Disalahkan, Membongkar Cara Pandang Tentang Perkosaan." Dalam *Perkosaan, Suatu Kajian Teoritik Kritis dan Empirik Kasus Tindak Perkosaan*. ELSAPA.
- Gordon, David A., John M. Kittross, Carol Reuss. (1996). *Controversies in Media Ethics*. USA: Longman.
- Habermas, Jurgen. (2015). *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardiman, Budi F. (2010). *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Jakarta: PT Kanisius.
- Hardiman, Budi F. (2016). *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Marx, Karl. (1963). *Early Writings*, ed dan terj oleh T.B Bottomore. New York: McGrawHill.
- Michael Schudson dan Chris Anderson. (2009). "Objectivity, Professionalism, and Truth Seeking in Journalism." Dalam Karin Wahl-Jorgensen dan Thomas Hanitzsch. *The Handbook of Journalism Studies*. New York: Routledge.
- Jenkins, Richard. (2016). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rolnicki, Tom E, C. Dow Tate, Sherri A. Taylor. (2015). *Pengantar Dasar Jurnalisme, Scholastic Journalism*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ryan, William. (1971). *Blaming the Victim*. New York: Pantheon.
- Schaacht, Richard. (2009). *Alienasi: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif* (terj.). Yogyakarta: Jalasutra.
- Siregar, Ashadi. (2008). *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka.
- Siregar, Amir Effendi. (2014). *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sobur, Alex. (2012). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tuchman, Gaye. (2002). "The Production of News. Klaus Bruhn Jensen (eds.), *A Handbook of Media and Communication Research*. London: Routledge.

Jurnal Dan Media Massa

- Entman, Robert M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, December.
- Feuer, Lewis. (1962). *What is Alienation? The Career of a Concept*. 'New Politics', Vol 1, No. 3.

- Kaufman, Arnolds S. (1965). *On Alienation*. 'Inquiry, vol. 8, No.2.
- Lestari, Anna Puji. (2018). *Digital Gender Gap Pattern in Indonesia*. E3S Web of Conferences 73, (2018) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873> ICENIS 2018.
- Lestari, Anna Puji. (2019a). *Saatnya Kampus Berpihak Kepada Korban Perkosaan*. kepri.antaranews.com. diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 01.00 WIB.
- Lestari, Anna Puji. (2019b). *Ikan Asin dan Kekerasan Simbolik Siber*. www.antaranews.com. Diakses 1 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB.
- Niemi, Laura dan Lianne Young (2014). *Blaming the Victim in the Case of Rape*. Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of Psychological Theory. Department of Psychology, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts.
- Schoellkopf, Julia Churchill. (2012). *Victim Blaming: A New Term for an Old Trend*. Jurnal Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer Center The Community, Equity, & Diversity. University of Rhode Island
- Solikhati, Siti, dkk. (2015). *Banalitas Simbol Keagamaan Dalam Sinetron Religi: Analisis Tayangan Sinetron "Bukan Islam KTP" di SCTV*. JURNAL ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.1, Januari – Juni 2015
- The Canadian Resource Centre for Victims of Crime. (2009). Kanada.
- Hensell, Carol. Jurnal Perempuan Nomor 71. (2011). *Perkosaan dan Kekuasaan*. Jakarta.